



RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN DEMAK**



JL. Kyai Jebat No. 881A Demak 59511

(0291) 685660 Web. www.bpkpad.demakkab.go.id

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka pemerintah daerah perlu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, baik rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP Daerah), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah), maupun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan rencana tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya, dan merupakan satu dokumen

rencana resmi yang dipersyaratkan bagi program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah tahunan pada umumnya. Perubahan Renja ini sebagai tindaklanjut hasil evaluasi dalam capaian kinerja BPKPAD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan perubahan RKPD 2025, sehingga dalam perubahan Renja 2025 ini dilakukan penyesuaian pagu anggaran guna mencapai target yang telah di rencanakan. Penyesuaian tersebut antara lain penyesuaian pagu anggaran gaji, pikir dewan, belanja tidak terduga, insentif retribusi daerah dan bagi hasil pajak ke desa. Selain itu ada sebagian kegiatan yang harus disesuaikan karena menyesuaikan standar harga yang berlaku di pasaran.

Perubahan Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut Perubahan Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah, SKPD menyusun Perubahan Renja-SKPD yang merupakan rencana pembangunan daerah tahunan yang mengacu pada Renstra SKPD dan RKPD, yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dan atas partisipasi dari masyarakat.

Dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaian, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Selain itu juga memuat keterangan yang menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Adapun indikator rencana kinerja meliputi : sasaran, program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
28. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;

29. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
34. Peraturan Bupati Demak Nomor xx Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025,

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang BPKPAD untuk Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Demak yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
2. Sebagai dokumen penjabaran Renstra BPKPAD dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan

perubahan tahun 2025.

3. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan perubahan tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan tugas pokok dan fungsi BPKPAD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja BPKPAD

- BAB II** Hasil Evaluasi Renja BPKPAD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025
- Bab ini menguraikan tentang kondisi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. dan evaluasi pelaksanaan Renja 2025 sampai dengan Triwulan I.
- BAB III** Tujuan dan Sasaran BPKPAD
- Memuat tentang Tujuan dan Sasaran dan Target Kinerja BPKPAD Tahun 2025.
- BAB IV** Rencana Kerja dan Pendanaan BPKPAD
- Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 dan Perubahannya beserta kerangka pendanaan.
- BAB V** Penutup
- Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA BPKPAD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN
2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2025 dan Capaian Renstra BPKPAD

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah yang pertama adalah Meningkatnya Pelayanan Publik dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 target 90 pada Triwulan 1 belum keluar nilainya atau NA karena masih proses penyebaran quetioner. Yang kedua Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPKPAD dengan indikator Nilai Sakip BPKPAD dengan target 83 nilai SAKIP pada saat penulis menyusun renja perubahan 2025 ini belum keluar dan biasanya nilai keluar sekitar bulan September atau awal oktober untuk nilai 2025 dan yang ketiga Meningkatkan Kualitas Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan indikator Hasil Opini Laporan Keuangan dengan target opini WTP telah nilai juga belum keluar dan saat ini masih dalam pemeriksaan BPK RI untuk hasil LKPD tahun 2024. Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ada 3, yang pertama adalah Meningkatnya kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah dengan indikator sasaran Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target 100% pada triwulan 1 2025 telah tercapai 100% sasaran yang kedua adalah Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD dengan target 100% pada triwulan 1 telah tercapai 100% dan sasaran yang ketiga adalah Terwujudnya Tata Kelola Keuangan ,pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal degan indikator sasaran Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan dengan target 100% telah tercapai 100%.

Pada tahun 2025 guna mendukung tercapainya tujuan

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah didukung dengan pagu anggaran Awal sebesar Rp. 483.162.336.600 namun dengan adanya efisiensi telah dilakukan pergeseran menjadi sebesar Rp. 482.356.980.600 yang pada Triwulan 1 tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp.148.342.395.862 atau sebesar 30,75 % dengan satu program rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan dengan target 100% dan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100%. Adapun program yang menjadi kewenangan dalam pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah yaitu yang pertama Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator program Persentase penetapan APBD tepat waktu dengan target 100% pada Triwulan I ini belum tercapai karena target ada di semester II , Persentase penyampaian LKPD tepat waktu dengan target 100% pada Triwulan I ini masih proses pemeriksaan BPK RI. Program yang kedua Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator program Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik dengan target 100% tercapai 100%, Program yang ketiga yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator program Tingkat Pertumbuhan PAD dengan target 10% pada Triwulan 1 telah terealisasi sebesar 20% atau 200% dari target tahun 2025 hal ini disebabkan pada awal 2025 adanya penambahan rekening opsen PKB dan opsen BBNKB yang menjadi bagian dari rekening pajak daerah sehingga capaian triwulan I cukup tinggi dibanding triwulan I tahun 2024.

Untuk Program yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja BPKPAD pada perubahan tahun 2025 yang pertama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada program ini ada 8 kegiatan 32 sub kegiatan. Program yang kedua yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah Pada program ini ada 4 kegiatan 19 sub

kegiatan. Program yang ketiga Pengelolaan Barang Milik Daerah pada program ini ada 1 kegiatan dan 11 sub kegiatan. Sedangkan program yang ke empat yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada program ini ada 1 kegiatan 7 sub kegiatan.

Sedangkan untuk mengetahui capaian pelaksanaan renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKPAD
dan Pencapaian Renstra BPKPAD s/d
Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERH KABUPATEN	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%
				Kegiatan :								
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah daerah	40 dok	10 dok	10 dok	1 dok	10%	10 dok	50%
				Sub Kegiatan :								
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dok	6 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	75%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 dok	3 dok	2 dok	1 dok	50%	2 dok	5 dok	63%
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	4 dok	50%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 lap	4 lap	3 lap	1 lap	33%	3 lap	7 lap	58%
					Kegiatan :									
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	5 lap	4 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	3 lap	60%
					Sub Kegiatan :									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 OB	192 OB	48 OB	48 OB	100%	52 OB	244 OB	102%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	425 DOK	425 dok	85 dok	85 dok	100%	12 dok	437 dok	103%
	Kegiatan :									
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	2 lap	102 dok	102%
	Sub Kegiatan :									
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 lap	75%
	Kegiatan :									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	41.96 %	100 %	25 %	25%	100 %	166.96 %	100%
	Sub Kegiatan :									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	425 pkt	170 pkt	85 pkt	0 pkt	0%	85 pkt	255 pkt	60%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	425 org	170 org	85 org	0 org	0%	85 org	255 pkt	60%
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	240 org	48 org	48 org	0 org	0%	48 org	144 org	60%
				Kegiatan :									
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	25 %	25%	100 %	100 %	100%
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 pkt	18 pkt	9 pkt	0 pkt	0%	9 pkt	27 pkt	60%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	310 pkt	62 pkt	62 pkt	0 pkt	0%	62 pkt	124 pkt	40%
				Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket perlengkapan kantor yang disediakan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45 pkt	20 pkt	9 pkt	0 pkt	0%	9 pkt	29 pkt	64%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	45 dok	20 dok	9 dok	1 dok	11%	9 dok	30 dok	67%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12 lap	12 lap	3 lap	25%	12 lap	27 lap	225%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 lap	30 lap	12 lap	3 lap	25%	12 lap	45 lap	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	60dok	12dok	32dok	0dok	0%	12 dok	24 dok	40%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	32dok	32dok	32dok	3dok	9%	32 dok	67 dok	209%
	Kegiatan :									
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	60unit	48unit	21unit	0unit	0%	21 unit	69 unit	115%
	Sub Kegiatan :									
	Pengadaraan kendaraan dinas operasional dan atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40pkt	10pkt	0pkt	0pkt	0%	5 pkt	15 pkt	38%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12unit	12unit	0pkt	0pkt	0%	3 unit	15 unit	125%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 unit	66 unit	32 unit	0 unit	100%	32 unit	98 unit	196%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	65 unit	34 unit	13 unit	4 unit	100%	13 unit	51 unit	78%
	Sub Kegiatan :									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1700 lap	2924 lap	2500 lap	977 lap	39%	300 0 lap	6901 lap	406%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	30 lap	12 lap	3 lap	25%	12 lap	45 lap	75%
	Kegiatan :									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	205 unit	101 unit	41 unit	9 unit	22%	41 unit	151 unit	74%
	Sub Kegiatan :									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 unit	33%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140 unit	86 unit	35 unit	8 unit	23%	40 unit	134 unit	96%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	110 unit	10 unit	110 unit	0 unit	100%	110 unit	120 unit	109%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 unit	28 unit	110 unit	0 unit	0%	110 unit	138 unit	125%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	7 unit	3 unit	0 unit	0%	3 unit	10 unit	67%
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	15 unit	3 unit	1 unit	33%	3 unit	19 unit	127%
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	366 unit	366 unit	366 unit	0 unit	0%	50 unit	416 unit	114%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penetapan APBD tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
						Persentase SKPD yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%	100%
						-Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
					Kegiatan :								
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran yang disusun	25 dok	10 dok	5 dok	0 dok	0%	5 dok	15 dok 60%
					Sub Kegiatan :								
					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	750 dok	450 dok	150 dok	0 dok	0%	150 dok	600 dok 80%
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	750 dok	300 dok	150 dok	0 dok	0%	2 dok	302 dok 40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1250 dok	250 dok	300 dok	300 dok	100%	300 dok	850 dok	68%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1500 dok	630 dok	300 dok	15 dok	5%	300 dok	945 dok	63%
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1500 dok	600 dok	300 dok	0 dok	0%	250 dok	850 dok	57%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan kas dan pengelolaan perbendaharaan	60 dok	30 dok	12 dok	3 dok	25%	12 dok	45 dok	75%
	Sub kegiatan :									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1200 dok	504 dok	240 dok	12 dok	5%	240 dok	756 dok	63%
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1160 dok	696 dok	232 dok	116 dok	50%	232 dok	1044 dok	90%
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi	210 dok	126 dok	42 dok	2 dok	5%	42 dok	170 dok	81%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	180 lap	76 Lap	36 lap	2 lap	6%	36 lap	114 lap	63%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	40000 dok	12731 dok	5000 dok	921 dok	18%	500 dok	6 dok	0%
	Pembinaan Penatausahaan keuangan kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	220 org	132 org	52 org	11 org	21%	52 org	184 org	84%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	20 dok	10 dok	4 dok	1 dok	25%	4 dok	15 dok	75%
				Sub Kegiatan :									
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	20 dok	10 dok	4 dok	1 dok	25%	4 dok	15 dok	75%
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	10 lap	6 lap	2 lap	1 lap	50%	2 lap	9 lap	90%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 dok	2 dok	2 dok	1 dok	50%	2 dok	6 dok	60%
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	15 dok	3 dok	3 dok	0 dok	0%	3 dok	6 dok	40%
					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5 dok	3 dok	1 dok	0 dok	0%	1 dok	4 dok	80%
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	550 org	110 org	110 org	110 org	100%	110 org	330 org	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan administrasi penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	60 dok	30 lap	12 lap	3 lap	25%	12 lap	45 dok	75%
	Sub Kegiatan :									
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	60 lap	30 lap	12 lap	3 lap	25%	12 lap	45 lap	75%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	60 lap	24 lap	12 lap	3 lap	25%	12 lap	39 lap	65%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset yang terdokumentasi dengan baik (Dengan Satuan:Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
					Kegiatan :									
					Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Aset yang terdokumentasi dengan baik (Dengan Satuan:Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
					Sub Kegiatan :									
					Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	625 dok	125 dok	125 dok	125 dok	100%	125 dok	375 dok	60%
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	25 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	15 dok	60%
					Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	25 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	15 dok	60%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	560 lap	112 lap	112 lap	112 lap	100%	112 lap	336 lap	60%
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	60 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 lap	60%
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	125 lap	25 lap	25 lap	25 lap	100%	25 lap	75 lap	60%
				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	25 lap	5 lap	5 lap	5 lap	100%	5 lap	15 lap	60%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	180 dok	36 dok	36 dok	36 dok	100%	36 dok	108 dok	60%
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10 lap	2 lap	2 lap	2 lap	100%	2 lap	6 lap	60%
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	100 lap	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100%	20 lap	60 laporan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	525org	105 orang	105 orang	105 orang	100%	105 org	315 orang	60%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan:Persen)	5%	7.20%	5%	6.45%	129%	5%	6.22%	124%
	Kegiatan :									
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Dengan Satuan:Rupiah)	2,198,393,818,780	477,198,401,098.80	461,751,167,860	508,055,346,277.83	110.02%	484 .450.000.000	1,469,703,747,377	66.85%
	Sub Kegiatan :									
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	15dok	3dok	3dok	3dok	100%	3 dok	9dok	60%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subke giatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingka t Capaia n (%) s.d Triwul an I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/ 4)
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	25 lap	5 lap	5 lap	5 lap	100%	5 lap	15 lap	60%
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	550 Lap	110 lap	110 lap	110 lap	100%	110 lap	330 Lap	60%
					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	301,500 Lap	60,300 Lap	60,300 Lap	60,300 Lap	100%	60,300 Lap	180,900 Lap	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pad kondisi akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Tingkat capaian s.d triwulan I tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10 /4)
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3,007,150 dok	601430 dok	601430 dok	100%	601430 dok	1,804,290 dok	60%
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2400 dok	480 dok	480 dok	100%	480 dok	1,440 dok	60%
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	4 lap	0 dok	0 dok	0%	2 lap	2 lap	50%

Dari tabel 2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja seluruh kegiatan rata-rata sudah tercapai dengan baik. Adapun diantara sub kegiatan ada yang belum tercapai targetnya karena target tersebut ada di triwulan 4 yaitu penetapan APBD perubahan 2025 dan Penetapan APBD 2026 dan untuk pertumbuhan PAD di Triwulan 1 telah tercapai 20% dari target 10% karena pada awal tahun 2025 adanya tambahan rekening opsen PKB dan opsen BBNKB yang masuk ke PAD sehingga capaian awal triwulan sangat tinggi dibandingkan tahun lalu

Tabel 2.2
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN
2025

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2024		2025 s.d Triwulan I						2026		Perkiraan realisasi s.d. 2026		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi	
							Anggaran								Anggaran (APBD)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
					NIHIL													

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur penunjang pada tahun 2025 tidak memiliki program prioritas. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan adalah mendukung semua program unggulan yang ada di kegiatan OPD dalam hal pengelolaan keuangan pendapatan dab asset daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan bidang urusan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Demak Nomor 74 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah organisasi perangkat daerah sebagai unsur penunjang dalam hal ini sebagai Tim Anggaran, secara spesifik tidak memiliki target dalam standar pelayanan minimal karena sebagai unsur pendukung semua urusan dalam hal penyediaan dana organisasi perangkat daerah sesuai pasal 10 ayat 2 Permendagri Nomor 59 tahun 2021 yang berbunyi Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari pasal tersebut jelas meskipun BPKPAD tidak memiliki target SPM namun harus memastikan anggaran Perangkat daerah yang memiliki target SPM dapat tercukupi anggarannya. Namun secara rinci dalam tabel pencapaian kinerja yang disesuaikan dengan target dalam laporan SPM, LPPD maupun SDGs dibawah ini dapat dijelaskan target dan capaian IKU, target SPM/Standar Nasional, IKK, target Renstra sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPAD Kab. Demak

NO	Indikator	IKU	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
					2023	2024	2025	2026	2024	2025 TW1	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-	-	V	6,75	6.50	6,25	6	0,67	0,20	6,25	0,67	Tidak tercapai
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-	-	V	10,3	10,5	10,5	104	22,79	0,28	10,5	22,79	Tercapai
3	Manajemen Aset							4					
	1. Apakah ada daftar asset tetap?	-	-	V	1. YA	1.YA	1. YA	1. YA	100	YA	1. YA	100	Tercapai
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	-	-	V	1. YA	1.YA	2. YA	2. YA	100	YA	2. YA	100	Tercapai
	3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?	-	-	V	3. YA	3.YA	3. YA	3. YA	100	YA	3. YA	100	Tercapai
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	-	-	V	4. YA	4.YA	4. YA	4. YA	100	YA	4. YA	100	Tercapai
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	-	-	V	5	5	5	5	5,12	0,79	5	5,12	Tercapai

NO	Indikator	IKU	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
					2023	2024	2025	2026	2024	2025 TW1	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	-	V	-	8,5	8,5	8,5	8,5	7,61	27,93	8,5	7,61	Tidak tercapai
6	Rasio PAD	-	V	-	1,35	1,35	1,35	1,45	22	23,73	1,35	22	Tercapai
7	Indek Kepuasan Masyarakat	V			85	85,3	85,5	85,75	90,30	0	90,30	90,30	Tercapai
8	Nilai Sakip BPKPAD	V			82	82,5	83	83,5	82,15	0	82.20	82,5	Tercapai
9	Persentase Keluhan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	V			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
10	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	V			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
11	Opini BPK terhadap laporan keuangan	V	V	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NA	WTP	WTP	Tercapai
12	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	V			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

NO	Indikator	IKU	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
					2023	2024	2025	2026	2024	2025 TW1	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Derajat Otonomi Fiska	V			17,55	17,65	17,75	17,75	22	30	20	22	Tercapai
14	Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	V			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
15	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	-	V	-	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
16	Persentase belanja Pendidikan (20%)	-	V	-	29,66	29,78	29,85	29,91	29,78	6,3	29,85	29,91	Tercapai
17	Persentase belanja Kesehatan (10%)	-	V	-	20,2	21,15	21,35	22,4	21,15	4,84	21,35	22,4	Tercapai
18	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	-	V	-	-	-					-		NA
19	Bagi hasil kabupaten/Kota dan desa	-	V	-	0,75	0,77	0,78	0,79	0,77	0	0,78	0,79	Tercapai
20	Penetapan APBD	-	V	-	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	Tercapai

Dari uraian tabel 2.3 diatas Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun 2024 rata-rata sudah tercapai dengan baik. Adapun untuk capaian 2024 sebagian belum tercapai karena indikator penilaian yang berbeda dari tahun sebelumnya sehingga data yang diminta belum bisa tercukupi. Selain itu adanya pemasangan target yang terlalu tinggi terutama SAKIP melihat nilai di 2024 maka diperubahan tahun 2025 target SAKIP kita turunkan dari semula 83 menjadi 82.20 hal ini mendasarkan pada trend kenaikan SAKIP di dua tahun terakhir diangka 0.5. Meskipun demikian kami tetap berupaya agar capaian SAKIP 2025 melebihi apa yang kami tergetnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – Tahun 2026 yaitu:

1. Kemandirian Keuangan Daerah Perlu Ditingkatkan
2. Keselarasan data perencanaan dan penganggaran perlu ditingkatkan
3. Penatausahaan Keuangan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Perlu ditingkatkan
4. Kualitas Pengelolaan Aset Daerah yang belum optimal.

Yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Permasalahan dan akar Permasalahan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal sesuai dengan potensi yang ada	Masih kurangnya kepatuhan masyarakat di dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan retribusi
		Perlunya peningkatan akurasi data potensi pendapatan daerah
2	Penetapan APBD dan APBD Perubahan yang harus tepat waktu	Belum terintegrasinya ASB dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran
		Keterbatasan waktu di dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD
3	Perlunya melaksanakan perbendaharaan dan penatausahaan	Adanya perubahan regulasi pengelolaan keuangan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Perlunya menyediakan informasi keuangan secara periodik
		Perlunya menatausahakan dan memverifikasi
		Perlunya menatausahakan gaji ASN
		Adanya kebutuhan mensinkronkan data keuangan daerah dengan pemerintah pusat
4	Perlunya tertib penatausahaan aset daerah	Perlunya peningkatan kegiatan manajemen aset
		Perlunya kegiatan penilaian atas aset daerah
		Kebutuhan akan standar satuan harga dalam pengelolaan keuangan

Berdasarkan akar permasalahan dari permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak tersebut maka semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan di laksanakan harus mampu menjawab apa yang sudah di petakan dan pada akhirnya mampu menjawab apa yang menjadi tujuan dari pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak lima tahun kedepan 2021-2026 dalam Visi, Misi, Tujuan serta program yang akan dilaksanakan.

Dalam melaksanakan Program/kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Aset dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
2. Belum adanya aplikasi pemanfaatan BMD
3. Masih terjadi kelebihan bayar gaji pegawai ASN

4. Pencatatan transaksi tidak tepat waktu
5. Penggunaan Aplikasi Berbasis Web (SIPD) yang tidak dikelola oleh pemerintah daerah
6. Belum maksimalnya penerimaan PBJT makanan dan minuman atas kegiatan di desa (yang bersumber dari dana desa)
7. Belum maksimalnya penerimaan Pajak Air tanah dan pajak reklame sehingga tidak terpenuhinya target pendapatan tahun 2024)
8. Adanya trend peningkatan Piutang PBB-P2 yang selalu meningkat tiap tahun.
9. Belum maksimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah secara digital (masih ada beberapa jenis retribusi yang di pungut secara tunai)

2.3. Reviu terhadap Rancangan Renja 2025

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak pada awal penyusunan Renstra 2021-2026 rencana kerja tahun 2025 mengusulkan Program sebanyak 4 (empat) program dengan 14 kegiatan dan 69 sub kegiatan. Guna menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dilakukan penyesuaian nama indikator sub kegiatan sehingga berakibat berubahnya nama indikatornya. Selain itu ada sub kegiatan yang semula tidak kami ambil atau tidak ada menjadi ada yaitu sub kegiatan Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, sebaliknya ada sub kegiatan yang semula ada pagunya yaitu sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor menjadi nol dan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pada usulan rencana kerja tahun 2025 ada Sub Kegiatan baru dari Program dan Kegiatan

Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu sub kegiatan Elektronikfikasi Transaksai Pemerintah Daerah Sub kegiatan ini merupakan Implikasi penerapan elektronikfikasi transaksi pemerintah daerah.

Adapun pagu usulan Renja perubahan Tahun 2025 di awal RKPD sebesar Rp. 462.783.271.600,- (Empat ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp. 480.909.646.261 (Empat ratus delapan puluh milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau naik sebesar Rp.18.180.374.661 atau (Delapan belas milyar seratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) atau 3,92% Sebagaimana tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	KEUANGAN				462.783.271.600					480.909.646.261	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	23.104.312.065	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	24.116.216.415	
			Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100%				Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	10 dokumen	40.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	10 dokumen	40.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	5.000.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	15.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Keuangan	1 dokumen	20.134.257.065	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Keuangan	1 dokumen	20.569.001.592	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah org yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 Orang/bln	19.409.779.165	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah org yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 Orang/bln	19.791.723.692	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	724.477.900	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen	12 dokumen	777.277.900	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	2 Laporan	2.070.000	Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	2 Laporan	2.070.000	
	Penatausahaan Barang milik daerah pada skpd	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.070.000	Penatausahaan Barang milik daerah pada skpd	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.070.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	567.709.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	479.753.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	24.300.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	26.400.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	480.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	389.944.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	63.409.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	63.409.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	569.109.385	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	556.112.585	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	28.303.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	28.212.800	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 Paket	157.088.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 Paket	157.088.500	
	Penyediaan bahan logistik	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah paket perlengkapan kantor yang disediakan	0	0	Penyediaan bahan logistik	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah paket perlengkapan kantor yang disediakan	0	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	25.105.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	25.105.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 dokumen	9.723.285	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 dokumen	9.723.285	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.025.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	59.625.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	206.544.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	20.544.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	20.544.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	32 Dokumen	26.320.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	32 Dokumen	31.920.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah BMD yang diadakan	21 unit	152.626.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah BMD yang diadakan	21 unit	665.368.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disaediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disaediakan	0	33.815.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	5.443.900	Pengadaan Mebel	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Mebel yang Disediakan	5 paket	349.594.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	85.150.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	234.300.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	62.033.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	47.659.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	13 unit	444.900.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	13 unit	468.550.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 laporan	4.900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 laporan	4.900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	440.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	463.650.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah BMD yang terpelihara	41 unit	1.193.639.715	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah BMD yang terpelihara	41 unit	1.335.361.238	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	175.846.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	181.471.700	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	170.009.015	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	213.395.770	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	110 unit	1.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	110 unit	1.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	3.000.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	508.847.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	578.048.068	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	322.892.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	346.400.700	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	11.545.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	11.545.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Persentase penetapan APBD tepat waktu	100%	402.407.836.300	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Persentase penetapan APBD tepat waktu	100%	420.584.567.300	
			Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100%				Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100%		
			Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	100%				Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	100%		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran yang disusun	10 dokumen	1.195.725.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran yang disusun	10 dokumen	1.184.440.000	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	72.990.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	126.025.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	72.990.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	127.525.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	312.675.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	368.355.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	283.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	276.730.000	
		Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		285.805.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dokumen	453.570.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dokumen	343.445.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan kas dan pengelolaan perbendaharaan	12 dokumen	387.160.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan kas dan pengelolaan perbendaharaan	12 dokumen	343.445.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240 Dokumen	45.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240 Dokumen	45.000.000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	123 dokumen	10.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	123 dokumen	10.000.000	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 laporan	79.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 laporan	60.400.000	

NO	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36 Laporan	13.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36 Laporan	13.000.000	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5000 dokumen	200.160.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5000 dokumen	184.110.000	

NO	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	235 orang	40.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	235 orang	30.935.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	4 dokumen	637.840.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	4 dokumen	586.288.000	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	52.553.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	62.517.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	160.970.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	114.917.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	344.419.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	315.719.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dokumen	41.448.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dokumen	18.448.000	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	950.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	2.580.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	37.500.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	72.107.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah dokumen laporan administrasi penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	12 dokumen	400.187.111.300	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah dokumen laporan administrasi penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	12 dokumen	418.470.394.300	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	397.687.111.300	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	416.470.394.300	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	2.500.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	2.000.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik	100%	1.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik	100%	1.179.114.000	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 laporan	1.000.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 laporan	1.179.114.000	
	Penyusunan Standar Harga	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 buku	56.160.000	Penyusunan Standar Harga	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 buku	28.625.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 buku	3.340.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 buku	1.730.000	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	205.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	205.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	105 laporan	1.590.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	105 laporan	7.950.000	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 laporan	5.400.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 laporan	2.700.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	150 laporan	603.700.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	150 laporan	701.900.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	10.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	100.000.000	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 Dokumen	118.405.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 Dokumen	149.280.000	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	13.130.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	10.250.000	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan	7.720.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan	-	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	210 orang	180.350.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	210 orang	176.474.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Tingkat pertumbuhan PAD	10%	36.271.123.235	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Tingkat pertumbuhan PAD	10%	35.873.143.235	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	607.001.786.347	36.271.123.235	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	607.001.786.347	35.873.143.235	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	1.878.973.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	1.370.603.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 laporan	1.253.737.500	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 laporan	1.681.343.500	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	26 laporan	80.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	26 laporan	645.450.000	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 laporan	88.200.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 laporan	253.760.000	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	31 dokumen	3.248.329.200	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	31 dokumen	3.397.849.200	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	39 laporan	29.497.883.535	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	39 laporan	27.508.542.846	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 laporan	224.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 laporan	44.000.000	
TOTAL					462.783.271.600					480.909.646.261	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para
Pemangku Kepentingan Tahun 2025
BPKPAD Kabupaten Demak

No	RENJA 2025				Perubahan RENJA 2025					Catatan
	Pekerjaan / Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Pekerjaan / Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	NIHIL				NIHIL					

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur penunjang pada tahun 2025 tidak memiliki program dan kegiatan masyarakat. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan adalah mendukung semua kegiatan OPD dalam hal pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai amanat Undang-Undang (UU), penyusunan rencana pembangunan nasional dilakukan dengan menerapkan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan manifestasi dari penerapan pendekatan partisipatif. Hasil pembahasan di dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) akan menjadi input bagi dokumen RPJMN 2025-2029 dan rancangan awal RKP tahun 2025. Keterlibatan para pemangku kepentingan dinilai sangat penting dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran tujuan Pembangunan Nasional. Karena itu, kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) diadakan guna mengoptimalkan perandan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, dan juga menjamin terjadinya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antara perencanaan di tingkat pusat maupun daerah. Penyusunan RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 mengimplementasikan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Penerapan pendekatan ini dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan dukungan non state actors dalam pembangunan melalui upaya mendorong peningkatan investasi swasta, merangkul dan memberdayakan masyarakat, serta mendorong inovasi dan solusi baru untuk percepatan pencapaian target pembangunan melalui akademisi. Kedudukan RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama dari pembangunan jangka menengah dan pelaksanaan

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Selanjutnya, kedudukan RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam rancangan UU RPJPN 2025-2045, bahwa RPJMN wajib selaras dan berpedoman kepada RPJPN serta RKP wajib selaras dan berpedoman kepada RPJMN. Penyusunan perencanaan pembangunan membutuhkan sinergi, integrasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Kemudian, sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah perlu diperkuat melalui berbagai rangkaian koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan. Terakhir, RPJMN dan tahunan akan jadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Adapun tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Adapun tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 dapat di uraikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2024**

No.	Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		
			2024	2025 TW 1	RPJMD pada tahun 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	90.3	NA	85,3	90	90.31
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	82,15	NA	82,50	83	82.20
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	102.63%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini Laporan Keuangan	WTP	NA	WTP	WTP	WTP
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1 Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Derajat Otonomi Fiskal	22	30	17,65	20	23
		3 Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas bahwa Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah yang pertama adalah Meningkatkan Pelayanan Publik dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat dan untuk tahun 2025 ditarget 90 pada RKPD perubahan karena capaian di akhir Triwulan 4 tahun 2024 sudah tercapai sebesar 90,30 maka meskipun nilai pada triwulan 1 belum keluar sesuai saran dari Bapperida pada saat desk target minimal harus sama dengan capaian terakhir yaitu 90,31 yang kedua Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

BPKPAD dengan indikator Nilai Sakip BPKPAD untuk tahun 2025 di target 83 pada RKPD perubahan 2025 target menjadi 82.20 hal ini karena di dua tahun terakhir perolehan nilai SAKIP tidak tercapai. Dengan melihat trend kenaikan nilai SAKIP di dua tahun terakhir di angka 0.5 kami berusaha realistis sehingga target diperubahan 2025 kami turunkan dari semula 83 menjadi 82.20 yang berarti ada kenaikan 0.25 dari perolehan tahun 2024 meski demikian kami tetap berusaha melakukan upaya agar capaian SAKIP 2025 melebihi dari apa yang kami targetkan. Dan yang ketiga Meningkatkan Kualitas Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan indikator Hasil Opini Laporan Keuangan dengan target WTP pada RKPD perubahan 2025 masih sama . Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ada 3, yang pertama adalah Meningkatnya kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah dengan indikator sasaran Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target 2025 adalah 100% sasaran yang kedua adalah Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD dengan indikator sasaran persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target dengan target 2025 adalah 100% dan sasaran yang ketiga adalah Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pendapatan dan Aset Pemerintah Daerah yang Optimal dengan indikator sasaran ada tiga yaitu yang pertama Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan dengan target 100%, yang kedua Persentase Perangkat Daerah yang mampu mengelola asset dengan baik dengan target 100% dan yang ketiga Derajat Otonomi Fiskal dengan target 20 pada perubahan 2025 target 23.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

4.1 . Program dan Kegiatan

Program yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang pertama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada program ini ada 8 kegiatan 32 sub kegiatan. Program yang kedua yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah Pada program ini ada 4 kegiatan 19 sub kegiatan. Program yang ketiga Pengelolaan Barang Milik Daerah pada program ini ada 1 kegiatan dan 11 sub kegiatan. Sedangkan program yang ke empat yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada program ini ada 1 kegiatan 7 sub kegiatan. Guna mencapai target indikator kinerja utama di Perubahan tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak saat ini mengusulkan pagu sebesar Rp. 480.909.646.261 (empat ratus delapan puluh milyar sembilan ratus Sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) jika dibandingkan dengan angka pagu pergeseran terakhir tahun 2025 yaitu sebesar Rp.483.162.336.600,- (Empat ratus delapan puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah). Dari jumlah tersebut ada penurunan usul pagu anggaran sebesar Rp. 2.252.690.339,- (Dua milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) namun jika dibandingkan dengan Pagu awal RKPD 2025 Rp. 462.783.271.600

(Empat ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) ada penambahan pagu sebesar Rp. 18.126.374.661 (Delapan belas milyar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), perubahan usulan pagu tersebut menyesuaikan dengan capaian kinerja di awal tahun 2025.

Adapun pagu yang kami usulkan dalam perubahan APBD 2025 dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKPAD Tahun 2025 Kabupaten Demak
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REVISI TPA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							462.783.271.606,00	483.162.336.000,00	480.369.646.261,00	18.126.374.661,00							653.018.706.393,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							462.783.271.606,00	483.162.336.000,00	480.369.646.261,00	18.126.374.661,00							653.018.706.393,00	
	5.02	KEUANGAN							462.783.271.606,00	483.162.336.000,00	480.369.646.261,00	18.126.374.661,00							653.018.706.393,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Penentasan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penentasan pelayanan sesuai standar pelayanan				100 100 % %	100 100 % %	23.104.312.063,00	24.294.463.065,00	24.116.216.415,00	30.665.888,00							23.134.977.353,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah				10 dokumen	10 dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		BPKPAD Kab. Demak		36.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Demak, Bantoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan				1 dokumen	1 dokumen	20.134.257.065,00	21.324.414.065,00	20.569.001.592,00	434.744.527,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		BPKPAD Kab. Demak	20.933.596.053,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang utan	50 Orang utan	19.409.779.165,00	20.599.936.165,00	19.791.723.692,00	301.944.527,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		19.584.575.703,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				80 Dokumen	80 Dokumen	724.477.900,00	724.477.900,00	777.277.900,00	52.800.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		1.349.020.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi				2 Laporan	2 Laporan	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		BPKPAD Kab. Demak	2.070.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		2.070.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	567.709.000,00	567.709.000,00	479.753.000,00	-87.956.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	BKPPAD Kab. Demak	536.729.700,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				85 Paket	85 Paket	24.300.000,00	24.300.000,00	26.400.000,00	2.100.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KesiDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		23.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				85 Orang	85 Orang	480.000.000,00	480.000.000,00	389.944.000,00	-90.056.000,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua KesiDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		430.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Penundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Penundang-Undangan				48 Orang	48 Orang	63.409.000,00	63.409.000,00	63.409.000,00	0,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		85.729.700,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	569.109.385,00	569.109.385,00	556.112.585,00	-12.996.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	BKPPAD Kab. Demak	422.654.600,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	28.303.600,00	28.303.600,00	28.212.800,00	-90.800,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KesiDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		9.332.100,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				62 Paket	62 Paket	157.088.500,00	157.088.500,00	157.088.500,00	0,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua KesiDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		157.088.500,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KesiDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		0,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	25.105.000,00	25.105.000,00	42.455.000,00	17.350.000,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua KesiDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		25.105.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan				9 Dokumen	9 Dokumen	9.723.285,00	9.723.285,00	9.723.285,00	0,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KesiDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		9.640.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	102.025.000,00	102.025.000,00	99.625.000,00	-2.400.000,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua KesiDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		102.025.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	206.544.000,00			Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KewDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD				32 Dokumen	32 Dokumen		20.544.000,00	20.544.000,00	20.544.000,00	0,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KewDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city			7.544.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DA ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	26.320.000,00	26.320.000,00	31.920.000,00	5.600.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KewDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city			1.920.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritnan Daerah	Jumlah BMD yang disediakan				21 unit	21 unit	152.626.900,00	152.626.900,00	666.368.000,00	512.741.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city	BPKPAD Kab. Demak		136.399.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	33.815.000,00	33.815.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KewDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	5.443.900,00	5.443.900,00	349.594.000,00	344.150.100,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KewDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city			5.716.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	85.150.000,00	85.150.000,00	234.300.000,00	149.150.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KewDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city			110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				32 Unit	32 Unit	62.033.000,00	62.033.000,00	47.659.000,00	-14.374.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KewDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city			20.683.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia				100 %	100 %	444.900.000,00	444.900.000,00	468.550.000,00	23.650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city	BPKPAD Kab. Demak		503.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3000 Laporan	3000 Laporan	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KewDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city			3.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	440.000.000,00	440.000.000,00	463.650.000,00	23.650.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KewDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city			500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara				41 unit	41 unit	1.193.639.715,00	1.193.639.715,00	1.335.361.238,00	141.721.523,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi berbasis smart city	BPKPAD Kab. Demak		563.128.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	13	14	15	16	17			18	19		20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							SERELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025															RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				40 Unit	40 Unit	175.846.700,00	175.846.700,00	181.471.700,00	5.625.000,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			130.000.000,00	BADAN PENGOLAAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.02.01.2.09.0002																						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ber tambah/Berkurang (10-12)							NASIONAL			DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2025	APROD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjelasan Perubahan APBD				300 Dokumen	300 Dokumen	283.500.000,00	291.280.000,00	276.730.000,00	-6.770.000,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			236.445.000,00	BADAN PENGOLAAH KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				48 Dokumen	48 Dokumen	453.570.000,00	358.505.000,00	285.805.000,00	167.785.000,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			50.000.000,00	BADAN PENGOLAAH KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan kas dan pengolahan perbendaharaan				12 dokumen	12 dokumen	387.160.000,00	387.160.000,00	343.445.000,00	-43.715.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Kab. Demak		377.660.000,00	BADAN PENGOLAAH KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				240 Dokumen	240 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			100.000.000,00	BADAN PENGOLAAH KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							
	5.02.02.2.02.0003	Penyisipan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penetriban Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen / Hasil Pengendalian dan Penetriban Anggaran Kas dan SPD				123 Dokumen	123 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			10.500.000,00	BADAN PENGOLAAH KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Asistansi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Uana Pembiangan dan Uana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Asistansi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiangan dan Dana Transfer Lainnya				82 Dokumen	82 Dokumen	79.000.000,00	79.000.000,00	60.400.000,00	-18.600.000,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			24.000.000,00	BADAN PENGOLAAH KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pembiangan Pihak Ketiga (PPK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pembiangan Pihak Ketiga (PPK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pembiangan Pihak Ketiga (PPK)				361 laporan	361 laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			13.000.000,00	BADAN PENGOLAAH KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SPD dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SPD dengan Instansi Terkait				5000 Dokumen	5000 Dokumen	200.160.000,00	200.160.000,00	184.110.000,00	-16.050.000,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			185.160.000,00	BADAN PENGOLAAH KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				42 Orang	42 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	30.935.000,00	9.065.000,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			40.000.000,00	BADAN PENGOLAAH KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah				4 dokumen	4 dokumen	637.840.000,00	637.840.000,00	586.288.000,00	-51.552.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Kab. Demak		638.340.000,00	BADAN PENGOLAAH KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kekayaan, Piutang, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan LO, dan Deban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kekayaan, Piutang, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan LO, dan Deban				4 Dokumen	4 Dokumen	62.553.000,00	62.553.000,00	62.517.000,00	9.964.000,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			44.017.000,00	BADAN PENGOLAAH KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							
	5.02.02.2.03.0004	Koreksidasi Laporan Keuangan GKPD, DLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)		14	15			16			18	19		21	
							SEBELUM	SESUDAH		APRD 2025	12								NASIONAL	DAERAH			TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			Jumlah Laporan Keuangan Sistem B/L dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tersinkronisasi				2 Laporan	2 Laporan	160.970.000,00	132.916.000,00	114.917.000,00	-46.053.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			148.260.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PERDAPATAN DAN ASSET DAERAH						
5.02.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	344.419.000,00	344.419.000,00	315.719.000,00	-28.700.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			318.729.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PERDAPATAN DAN ASSET DAERAH						
5.02.02.2.03.0007		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Tuntutan Pertanggungjawaban dan Tuntutan Kelembagaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Tuntutan Pertanggungjawaban dan Tuntutan Kelembagaan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	41.448.000,00	18.448.000,00	18.448.000,00	-23.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			41.390.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PERDAPATAN DAN ASSET DAERAH						
5.02.02.2.03.0009		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	950.000,00	950.000,00	2.580.000,00	1.630.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			75.946.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PERDAPATAN DAN ASSET DAERAH						
5.02.02.2.03.0011		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				240 Orang	240 Orang	37.500.000,00	88.554.000,00	77.107.000,00	-14.607.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PERDAPATAN DAN ASSET DAERAH						
5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan administrasi penunjang urusan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah				12 dokumen	12 dokumen	100.167.111.300,00	119.376.019.300,00	118.170.391.300,00	-18.283.283.000,00	Kab. Demak		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Kab. Demak		126.757.833.190,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PERDAPATAN DAN ASSET DAERAH						
5.02.02.2.04.0008		Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	397.087.111.300,00	414.376.019.300,00	416.470.394.300,00	19.703.283.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			419.707.933.490,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PERDAPATAN DAN ASSET DAERAH						
5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-500.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			7.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PERDAPATAN DAN ASSET DAERAH						
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.179.114.000,00	-350.000.000,00							850.000.000,00							
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah				112 dokumen	112 dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.179.114.000,00	179.114.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Kab. Demak		950.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PERDAPATAN DAN ASSET DAERAH						
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				125 Dokumen	125 Dokumen	56.160.000,00	31.800.000,00	28.625.000,00	-27.535.000,00	Kab. Demak, Semu Kecamatan, Semu KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			34.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PERDAPATAN DAN ASSET DAERAH						
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3.340.000,00	3.340.000,00	1.730.000,00	-1.610.000,00	Kab. Demak, Semu Kecamatan, Semu KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			3.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PERDAPATAN DAN ASSET DAERAH						
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	705.000.000	705.000.000	705.000.000	0,00	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			3.500.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				112 Laporan	112 Laporan	1.500.000.000	1.500.000.000	7.950.000.000	6.360.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			5.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LIR) Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	5.400.000.000	5.400.000.000	7.700.000.000	-7.700.000.000	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			141.600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				25 Laporan	25 Laporan	603.700.000.000	602.950.000.000	701.900.000.000	98.200.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			120.150.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Horisontal Barang Milik Daerah				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000.000	10.000.000.000	100.000.000.000	90.000.000.000	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			10.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				38 Dokumen	38 Dokumen	118.405.000.000	143.515.000.000	149.280.000.000	30.875.000.000	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			230.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	13.130.000.000	13.130.000.000	10.250.000.000	-2.880.000.000	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			39.300.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				20 Laporan	20 Laporan	7.720.000.000	7.720.000.000	0,00	-7.720.000.000	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			6.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				105 Orang	105 Orang	180.350.000.000	180.350.000.000	176.174.000.000	-3.876.000.000	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			56.200.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat pertumbuhan PAD				6 %	6 %	36.271.123.235,00	36.271.123.235,00	35.029.746.946,00	164.595.776.715,00							200.866.899.950,00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				0 rupiah 415 milyar rupiah	0 rupiah 415 milyar rupiah	36.271.123.235,00	36.271.123.235,00	35.029.746.946,00	1.241.374.689,00						Kab. Demak		200.866.899.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.878.973.000.000	1.868.473.000.000	1.648.403.000.000	230.570.000.000	Kab. Demak, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			1.201.976.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REKJUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.253.737.500,00	1.869.543.500,00	1.531.743.500,00	278.008.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			12.270.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				110 Laporan	110 Laporan	80.000.000,00	630.000.000,00	645.450.000,00	565.450.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			252.954.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				60300 Laporan	60300 Laporan	88.200.000,00	288.760.000,00	293.760.000,00	165.960.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			48.350.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				601430 Dokumen	601430 Dokumen	3.248.329.200,00	3.325.619.200,00	3.397.849.200,00	149.520.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			3.276.399.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pengawasan Pajak Daerah				460 Dokumen	460 Dokumen	29.497.883.535,00	28.444.727.535,00	27.508.542.840,00	-1.989.340.689,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			198.075.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	224.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	-180.000.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
			J U M L A H						462.783.271.600,00	493.162.336.600,00	490.909.646.261,00	18.126.374.661,00						553.018.706.393,00			

Tabel 4.2
Program Prioritas dan Rencana Implementasi

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2025 TW		TARGET 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		NIHIL											

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur penunjang tidak memiliki program prioritas, hal ini tentu akan lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada organisasi perangkat daerah yang lain dalam pengelolaan keuangan, pendapatan serta aset daerah.

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2026 sesuai Program Unggulan Bupati
Periode 2025 -2029

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)		Proyeksi 2025		Target 2026		Target Akhir 2029		Kode Sub kegiatan	Ket
				Kinerja	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			NIHIL										

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur penunjang tidak memiliki Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2026 sesuai Program Unggulan Bupati Periode 2025 -2029, hal ini tentu akan lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada organisasi perangkat daerah yang lain dalam pengelolaan keuangan, pendapatan serta aset daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 ini merupakan tindaklanjut hasil evaluasi dalam capaian kinerja BPKPAD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan perubahan RKPD 2025, sehingga dalam perubahan Renja 2025 ini dilakukan penyesuaian Pagu anggaran guna mencapai target yang telah di rencanakan penyesuaian tersebut antara lain penyesuaian Pagu rekening anggaran Pajak daerah dan Retribusi daerah dan anggaran dana bagi hasil Pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan untuk kegiatan yang ada di bidang aset ada penambahan pagu anggaran rencana akan digunakan untuk Papan Nama dan Patok untuk memenuhi data pengamanan aset dari KPK sedangkan untuk kegiatan yang lain sifatnya hanya pergeseran karena menyesuaikan dengan dana yang ada dan target yang sudah terpenuhi pagu anggaran dialihkan ke kegiatan yang masih membutuhkan dana lebih tinggi.

Selain itu ada Sebagian kegiatan yang harus disesuaikan karena menyesuaikan standar harga yang berlaku di pasaran. Selain itu yang perlu digarisbawahi bahwa Rencana Kerja Perubahan BPKPAD ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yang memuat antara lain evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja akhir, telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Bidang dalam Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak wajib melakukan pengendalian dan

evaluasi atas hasil pelaksanaan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator yang pertama Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100% yang kedua Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan dengan target 100%, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator yang pertama Persentase penetapan APBD tepat waktu dengan target 100% indikator yang kedua Persentase penyampaian LKPD tepat waktu dengan target 100% indikator yang ketiga penyampaian laporan keuangan sesuai SAP dengan target 100% Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase asset yang terdokumentasi dengan baik dengan target 100% dan program terakhir yaitu Program Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan daerah tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

5.3. Rencana tindak lanjut

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah sebagai acuan penyusunan dokumen anggaran tahun 2025 agar lebih terarah untuk mencapai visi, misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Selain itu Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 juga digunakan sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.

Demak, Agustus 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan Dan Aset Daerah
Kabupaten Demak

Yudi Santosa, SE, MS.i, Akt
Pembina Tingkat I
197806192003121007